

BAB III

PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA

PBB merupakan sebuah organisasi universal dimana setiap negara di dunia bisa menjadi anggotanya, tentunya dengan syarat yang telah ditentukan oleh organisasi tersebut. Persepsi yang ada, sebuah negara, jika tidak menjadi anggota PBB, akan banyak mengalami kesulitan. Bakal terkucil atau dikucilkan. Sebaliknya menjadi anggota PBB seakan-akan berada dalam perkumpulan elit dunia. PBB merupakan sebuah organisasi eksklusif. Derajat sebuah bangsa, dengan sendirinya terangkat apabila menjadi anggota dari PBB. Hal inilah yang mendorong Palestina untung mengajukan diri menjadi anggota tetap PBB sebagai sebuah negara.

A. Gambaran Umum PBB

Liga Bangsa-Bangsa dianggap gagal mencegah Perang Dunia II (1939-1945). Karena pengakuan luas bahwa manusia tidak mampu membeli Perang Dunia Ketiga, PBB didirikan untuk menggantikan Liga Bangsa-Bangsa yang dianggap cacat pada tahun 1945 dalam rangka untuk memelihara perdamaian internasional dan meningkatkan kerjasama dalam memecahkan masalah ekonomi, sosial dan kemanusiaan internasional.

Rencana awal untuk sebuah organisasi dunia baru dimulai di bawah naungan Departemen Luar Negeri AS pada tahun 1939. Franklin D. Roosevelt pertama menciptakan istilah PBB sebagai istilah untuk menggambarkan negara-

negara Sekutu. Istilah ini pertama kali secara resmi digunakan pada 1 Januari 1942, ketika 26 pemerintah menandatangani Piagam Atlantik, berjanji untuk melanjutkan usaha perang.

Pada tanggal 25 April 1945, Konferensi PBB tentang Organisasi Internasional dimulai di San Francisco, dihadiri oleh 50 pemerintah dan sejumlah organisasi non-pemerintah yang terlibat dalam penyusunan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. PBB resmi muncul pada 24 Oktober 1945 atas ratifikasi Piagam oleh lima anggota tetap Dewan Keamanan yaitu Perancis, Republik Cina, Uni Soviet, Inggris dan Amerika Serikat dan mayoritas lainnya 46 penandatanganan. Pertemuan pertama Majelis Umum, dengan diwakili 51 negara, dan Dewan Keamanan, terjadi di Westminster Central Hall di London pada Januari 1946.

Hingga tahun 2007 sudah ada 192 negara anggota PBB. Sekretaris Jenderal PBB saat ini adalah Ban Ki-moon asal Korea Selatan yang menjabat sejak 1 Januari 2007. Tujuannya adalah memfasilitasi kerjasama dalam hukum internasional, keamanan internasional, pembangunan ekonomi, kemajuan sosial, hak asasi manusia, dan pencapaian perdamaian dunia.

Saat ini ada 192 negara anggota (termasuk hampir setiap negara berdaulat di dunia). Organisasi ini memiliki enam organ utama:

- 1) Majelis Umum (majelis musyawarah utama)
- 2) Dewan Keamanan (untuk memutuskan resolusi tertentu untuk

- 3) Dewan Ekonomi dan Sosial PBB (untuk membantu dalam mempromosikan kerjasama ekonomi dan sosial internasional dan pembangunan)
- 4) Sekretariat (untuk studi menyediakan, informasi, dan fasilitas yang diperlukan oleh PBB)
- 5) Mahkamah Keadilan Internasional (organ peradilan primer)
- 6) Dewan Perwalian PBB (yang saat ini aktif) Sistem PBB lainnya yang menonjol lembaga termasuk Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), World Food Programme (WFP) dan Dana PBB untuk Anak-anak (UNICEF).

Organisasi ini didanai dari sumbangan dan sukarela dari negara-negara anggotanya, dan memiliki enam bahasa resmi yaitu Arab, Cina, Inggris, Perancis, Rusia, dan Spanyol.⁵⁵ Piagam PBB adalah konstitusi PBB. Ditandatangani di San Francisco pada 26 Juni 1945 oleh kelima puluh anggota asli PBB. Piagam ini mulai berlaku pada 24 Oktober 1945 setelah diratifikasi oleh lima anggota pendirinya yaitu Republik Cina, Perancis, Uni Soviet, Britania Raya, Amerika Serikat dan mayoritas penanda tangan lainnya.

Sebagai sebuah Piagam, piagam ini adalah sebuah perjanjian konstituen, dan seluruh penandatanganan terikat dengan isinya. Selain itu, Piagam tersebut juga secara eksplisit menyatakan bahwa Piagam PBB mempunyai kuasa melebihi seluruh perjanjian lainnya. Piagam ini diratifikasi oleh Amerika Serikat pada 8

⁵⁵ <http://duniabaca.com/sejarah-pbb-perserikatan-bangsa-bangsa.html> diakses 7 Januari 2012

Agustus 1945, yang membuatnya menjadi negara pertama yang bergabung dengan PBB.⁵⁶

B. Keanggotaan PBB

Sesuai dengan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa Keanggotaan di PBB terbuka untuk semua negara yang cinta damai dan menerima kewajiban-kewajiban yang terkandung dalam Piagam PBB, berdasarkan penilaian organisasi dan mampu melaksanakan kewajiban. Negara diakui untuk keanggotaan di PBB dengan keputusan Majelis Umum atas rekomendasi Dewan Keamanan.

Prosedur yang harus dilakukan untuk menjadi anggota penuh PBB yaitu :

- 1) Negara mengajukan permohonan dan surat resmi kepada Sekretaris Jenderal yang menyatakan bahwa ia menerima kewajiban-kewajiban berdasarkan Piagam PBB.
- 2) Dewan Keamanan mempertimbangkan proposal tersebut. Setiap rekomendasi untuk masuk harus mendapatkan suara sedikitnya 9 dari 15 anggota Dewan Keamanan, asalkan bahwa tidak satupun dari lima anggota tetap yaitu China, Perancis, Rusia, Inggris dan Amerika Serikat Amerika tidak melakukan veto.
- 3) Jika Dewan Keamanan telah merekomendasikan pengakuan, rekomendasi disampaikan kepada Majelis Umum untuk dipertimbangkan. Sebuah suara mayoritas dua pertiga yang diperlukan dalam Majelis untuk masuk dari suatu Negara baru.

⁵⁶ <http://hoi-unmul.blogspot.com/2009/12/united-nations-perserikatan-bangsa.html> diakses 7

4) Keanggotaan menjadi efektif sejak tanggal resolusi untuk masuk disetujui.⁵⁷

Perserikatan Bangsa-Bangsa memiliki 6 organ utama yakni Majelis Umum, Dewan Keamanan, Dewan Ekonomi dan Sosial, Sekretariat, Mahkamah Internasional dan Dewan Perwalian. Dari keenam organ utama tersebut, Dewan Keamanan lah yang sangat berpengaruh terhadap pengambilan keputusan di persidangan PBB. Dewan Keamanan PBB adalah badan terkuat di PBB. Tugasnya adalah menjaga perdamaian dan keamanan antar negara. Sedang badan PBB lainnya hanya dapat memberikan rekomendasi kepada para anggota, Dewan Keamanan mempunyai kekuatan untuk mengambil keputusan yang harus dilaksanakan para anggota di bawah Piagam PBB. Dewan Keamanan mengadakan pertemuan pertamanya pada 17 Januari 1946 di Church House, London dan keputusan yang mereka tetapkan disebut Resolusi Dewan Keamanan PBB. Tugas Dewan Keamanan adalah membantu mencapai perdamaian dunia dan berupaya menyelesaikan konflik yang terjadi antarnegara di dunia agar dapat terselesaikan secara damai.⁵⁸

Anggota Dewan Keamanan terdiri dari dua macam keanggotaan yaitu anggota tetap dan tidak tetap. Anggota tetap terdiri atas lima negara (The Big Five), yaitu AS, Rusia, Prancis, Inggris, dan Cina. Anggota tetap Dewan Keamanan memiliki hak veto, artinya hak untuk membatalkan suatu keputusan. Apabila dalam suatu persidangan salah satu anggota tetap memveto keputusan

⁵⁷ <http://translate.google.co.id/translate?hl=id&langpair=en|id&u=http://www.un.org/en/members/> diakses 8 januari 2012

⁵⁸ <http://afandabatas.com/post/detail/9230/badan-badan-kelengkapan-perserikatan-bangsa->

maka keputusan tersebut dibatalkan. Sedang anggota tidak tetap terdiri dari sepuluh negara yang dipilih setiap dua tahun dalam sidang umum. Saat ini anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB yaitu Kolombia, Jerman, India, Portugal, Afrika Selatan, Azerbaijan, Guatemala, Maroko, Pakistan dan Togo.

C. Signifikan PBB terhadap Palestina

Mayoritas negara di dunia menjadi anggota PBB. Fakta inilah yang mungkin membuat banyak negara berpendapat menjadi anggota badan dunia tersebut adalah sangat penting. Persepsi yang ada, sebuah negara, jika tidak menjadi anggota PBB, akan banyak mengalami kesulitan. Bakal terkucil atau dikucilkan. Sebaliknya menjadi anggota PBB seakan-akan berada dalam perkumpulan elit dunia. PBB merupakan sebuah organisasi eksklusif. Derajat sebuah bangsa, dengan sendirinya terangkat apabila menjadi anggota dari PBB. Hal inilah yang mendorong Palestina untung mengajukan diri menjadi anggota tetap PBB sebagai sebuah negara.

Ruang lingkup peran PBB mencakup penjaga perdamaian, pencegahan konflik dan bantuan kemanusiaan. Selain itu, PBB juga menanganii berbagai permasalahan mendasar seperti pembangunan berkelanjutan, lingkungan dan perlindungan pengungsi, bantuan bencana, terorisme, perlucutan senjata dan non-proliferasi, mempromosikan demokrasi, hak asasi manusia, kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, pemerintahan, ekonomi dan pembangunan sosial, kesehatan upaya pembersihan raniau darat perluasan produksi pangan dan

berbagai hal lainnya, dalam rangka mencapai tujuan dan mengkoordinasikan upaya-upaya untuk dunia yang lebih aman untuk ini dan generasi mendatang.

Palestina berharap dengan menjadi anggota penuh PBB, Palestina akan diakui sebagai sebuah negara yang merdeka dan dapat menyelesaikan konflik yang berkepanjangan dengan Israel. PBB diharapkan dapat menjalankan perannya sesuai dengan apa yang menjadi dasar pendirian PBB guna membantu menyelesaikan konflik yang terjadi sehingga tidak ada lagi peperangan yang terjadi di tanah Palestina dan rakyat palestina dapat hidup dengan damai.

D. Proses Permohonan Keanggotaan Palestina di PBB

Akhir tahun 2010, para pejabat Palestina mulai melakukan strategi diplomatik yang baru, yaitu meminta satu persatu pemerintahan untuk mengakui negara Palestina yang merdeka dengan perbatasan sebelum perang 1967. Kini Palestina menginginkan agar PBB mengakui Palestina sebagai anggota penuh organisasi internasional tersebut. PLO saat ini hanya diberi status sebagai pengamat di PBB. Status ini berarti perwakilan PLO di PBB bisa menghadiri pertemuan-pertemuan dan memberi pidato tapi tak memiliki hak suara atas veto maupun resolusi atau keputusan PBB penting lainnya.⁵⁹ Pada 1974, Majelis Umum PBB menerbitkan Resolusi 3237 yang mengakui PLO sebagai status pengamat di PBB. Sejak 1988, PBB sudah mengkategorikan Palestina ke dalam

⁵⁹ <http://www.republika.co.id/berita/internasional/palestina-israel/11/09/21/lrus47-faktafakta-di-balik-rencana-palestina-di-pbb-bagian-1> diakses 20 januari 2012

Entitas yang menerima Undangan Berdiri untuk Berpartisipasi Sebagai Pengamat dalam Sesi-Sesi dan Kerja Majelis Umum.⁶⁰

Prosedur yang harus dilalui untuk menjadi anggota PBB adalah permohonan keanggotaan melalui sidang tahunan Majelis Umum di New York tanggal 21 September 2011. Untuk bisa menjadi anggota PBB, Palestina membutuhkan persetujuan dari Dewan Keamanan PBB yang beranggotakan 15 negara, dengan 5 negara anggota tetap DK dengan catatan tidak adanya veto dari kelima anggota tetap tersebut. Rekomendasi apapun dari Dewan Keamanan membutuhkan dukungan mayoritas 2/3 dari 193 anggota Majelis Umum untuk pengesahan akhir.

Untuk memulai proses ini, Abbas telah mengajukan permohonan resmi kepada Sekjen PBB, Ban Ki Moon. Sekjen PBB kemudain akan meneruskan permohonan itu kepada Dewan Keamanan yang akan membentuk sebuah komite. Sumber-sumber Palestina mengatakan surat permohonan ini singkat dan padat, dan mempertimbangkan negara berdasarkan batas-batas wilayah sebelum tahun 1967 dengan Yerusalem sebagai ibukota. Permohonan Palestina ini masih perlu dibahas di tingkat Dewan Keamanan, dan sedikitnya harus mendapat dukungan sembilan dari 15 anggota dan tidak mendapat veto dari salah satu anggota tetap Dewan Keamanan. Rakyat Palestina menggelar rapat akbar bertepatan dengan pengumuman Presiden Abbas ini. Berbagai layar lebar telah dipasang di beberapa kota Palestina sehingga rakyat bisa menyaksikan pidato presiden.

⁶⁰ <http://www.republika.co.id/berita/internasional/palestina-israel/11/09/20/lrsz01-skenario-kedua-palestina-di-sidang-pbb-butuh-dukungan-mayoritas-anggota-pbb-2> diakses 20 Januari 2012

Hari bersejarah bagi Palestina ini diwarnai bentrokan antara pasukan keamanan Israel dan warga Palestina di Tepi Barat. Seorang warga Palestina tewas dalam bentrokan di tengah ketegangan terkait permohonan keanggotaan Palestina di PBB. Inggris dan Prancis sudah hampir pasti abstain karena mereka tidak bisa mendukung keanggotaan PBB untuk sebuah negara yang belum mereka akui secara bilateral. Resolusi bisa meminta dukungan agar Palestina diterima sebagai negara pengamat bukan anggota yang berarti setingkat dari status PLO saat ini sebagai pengamat. Status negara pengamat bukan anggota antara lain dipegang Vatikan. Dulu Swiss pernah memiliki status ini sebelum menjadi anggota penuh.

Status itu akan meningkatkan peluang Palestina untuk bergabung dengan organisasi-organisasi milik PBB, termasuk ICC walau tidak langsung otomatis atau dijamin. Sejauh ini upaya Palestina menjadi anggota penuh di PBB belum membuahkan hasil, akan tetapi Palestina berhasil menjadi anggota penuh UNESCO pada akhir Oktober 2011 dengan memenangkan 107 suara yang menjadikannya anggota ke 195.

Jajak pendapat baru-baru ini menyebutkan permohonan menjadi anggota PBB ini didukung oleh sejumlah besar warga Palestina di wilayah pendudukan. Faksi utama Fatah, pimpinan Abbas, mendukungnya walau dukungan tidak sama kuatnya dari faksi saingan, Hamas, yang menguasai Jalur Gaza. Setelah rekonsiliasi antara keduanya, pemimpin Hamas menerima konsensus yang meluas tentang pembentukan negara Palestina berdasarkan perbatasan sebelum 1967 namun secara resmi tetap menolak pengakuan atas Israel. Setelah pidato Abbas

pada tanggal 16 September, Hamas mengatakan permohonan ke PBB itu sebagai risiko yang besar. Di kawasan Timur Tengah, 22 anggota Liga Arab memberikan dukungan sepenuhnya atas gagasan itu.⁶¹

Dukungan lainnya juga ditunjukkan oleh negara-negara ASEAN. Para pemimpin Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) memberikan dukungan penuh terhadap permohonan Palestina untuk menjadi anggota penuh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Pernyataan sikap terkait Palestina itu dituangkan dalam Pernyataan Ketua Pertemuan Puncak (KTT) ke-19 ASEAN di Nusa Dua, Bali.⁶²

Sekjend Liga Arab, mempertegas dukungannya atas diterimanya Palestina sebagai anggota PBB. IQNA merilis dari situs french.cri, bahwa Nabil Al Arabiy, Sekjend Liga Arab menyampaikan hal itu dalam pertemuan yang diadakan di Kairo, ibu kota Mesir. Dalam kesempatan itu Nabil didukung oleh Mohammad Kamil Amru, Menlu Mesir, Zhan Biynk, Ketua Komisi Persatuan negara-negara Afrika dan Samiyar Bek, Wakil Sekjend OKI untuk mendesak PBB menerima keanggotaan Palestina sebagai negara berdaulat.⁶³

Anggapan Palestina bahwa PBB dapat menjadikan jalan bagi Palestina menuju sebuah negara yang berdaulat, menjadikan Palestina menaruh harapan banyak akan upayanya di PBB. Dukungan terhadap upaya Palestina tersebut menuai banyak respon, termasuk dukungan dari mayoritas negara anggota PBB,

⁶¹ http://www.bbc.co.uk/indonesia/laporan_khusus/2011/09/110920_qapalestina.shtml

Diakses 28 februari 2012

⁶² <http://www.gatra.com/nasional-cp/1-nasional/4898-asean-dukung-palestina-masuk-pbb> diakses 8 maret 2012

⁶³ http://www.iana.ir/ma/news_detail.php?ProdID=854643 diakses 8 maret 2012

ASEAN, Liga Arab bahkan Persatuan negara-negara Afrika. Hal ini tentu menarik bila kita melihat reaksi dari negara penegak demokrasi dunia yaitu AS. AS merupakan negara yang menjunjung tinggi demokrasi di dunia, dimana demokrasi selalu menekankan tentang kebebasan untuk menentukan nasib setiap negara